

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyelidik terkait dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran penyelidik Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah Kota Jambi, apakah telah sesuai dengan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia, apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas, yaitu melaksanakan penegakan Peraturan Daerah serta tugas dan wewenang untuk menyelidiki pelanggaran Peraturan Daerah, terutama terhadap kasus pelanggaran mengenai penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Tidak hanya itu, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta tanggapan negatif dari masyarakat. Namun interpretasi terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi belum sepenuhnya tercapai. Saran diharapkan agar meningkatkan kinerja dalam melakukan penyelidikan melalui penegakan hukum yang lebih kuat lagi dan penyediaan sumber daya manusia yang lebih memadai, serta meningkatkan kerja sama dengan instansi lain seperti.

Kata Kunci: ***Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penyelidik, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol***

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the role of the Civil Service Police Unit as an investigator related to the enforcement of the Jambi City Regional Regulation (Perda), and to identify the obstacles faced by the Jambi City Civil Service Police Unit against violations of Regional Regulations. The formulation of the problem of this study is how is the role of the Civil Service Police Unit investigator in enforcing the Jambi City regional regulations, whether it is in accordance with the principles of criminal procedure law in Indonesia, what are the obstacles faced by the Civil Service Police Unit in enforcing the Jambi City regional regulations. The research method used is empirical juridical, with data collection techniques through interviews and applicable regulations. The results of the study state that the Civil Service Police Unit has the task of enforcing Regional Regulations as well as the authority and responsibility to investigate violations of Regional Regulations, especially cases of violations regarding the sale of alcoholic beverages without a permit (illegal). Negative responses from the public regarding the actions taken by the Civil Service Police Unit also become obstacles and constraints, where some business owners feel disadvantaged and do not want to comply with existing regulations. Not only that, the Civil Service Police Unit faces obstacles, such as limited human resources and negative responses from the public. However, the interpretation of the role of the Civil Service Police Unit in enforcing the Jambi City Regional Regulation has not been fully achieved. Suggestions for agencies are expected to improve performance in conducting investigations through stronger law enforcement and the provision of more adequate human resources, as well as increasing cooperation with other agencies such as the police.

Keywords: *Role, Civil Service Police Unit, Investigators, Regional Regulations, Alcoholic Beverages*